

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan hasil yang telah peneliti paparkan tentang Implementasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah (BPU) di BPJS Ketenagakerjaan Kota Padang dapat disimpulkan bahwa Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sudah diimplementasikan, namun dalam penerapannya masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari teori yang digunakan oleh peneliti yaitu teori Van Meter dan Van Horn yang mana teori tersebut terdiri dari enam variabel yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antar organisasi, sikap atau kecenderungan para pelaksana dan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

Berdasarkan hasil dan temuan dilapangan peneliti menarik kesimpulan bahwa Implementasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah (BPU) di BPJS Ketenagakerjaan Kota Padang sudah diimplementasikan namun dalam penerapannya masih belum optimal. Hal ini dilihat dari adanya upaya dan strategi yang telah dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan Kota Padang yang mana terdapat beberapa hambatan yang terjadi seperti masih kurangnya sumber daya manusia dalam penerapan program ditambah terdapat beban kerja lainnya yang dapat berdampak kepada tugas utama seperti kurangnya sosialisasi yang dilakukan. Kemudian terdapat komunikasi dan koordinasi yang belum dilaksanakan secara konsisten dengan lembaga dan wadah tenaga kerja. Setelah itu pada kondisi sosial masih kurangnya kesadaran, pengetahuan dan pemahaman serta kesalahpahaman

masyarakat terkait program dimana masyarakat masih bingung membedakan BPJS Kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan dan hanya mengetahui program Jaminan Kecelakaan Kerja saja, pada kondisi ekonomi dari pekerja rentan/miskin terdapat hambatan untuk membayar iuran dikarenakan rendahnya penghasilan pekerja dan pada kondisi politik sudah terdapat dukungan dari elit politik tetapi masih perlu dimaksimalkan dalam penerapan program.

Oleh karena itu, setelah menganalisis hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penerapan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah di BPJS Ketenagakerjaan Kota Padang maka peneliti mencoba untuk memberikan beberapa saran dan rekomendasi. Saran dan rekomendasi dimaksudkan agar program ini dapat diimplementasikan dengan baik, yakni sebagai berikut:

6.2 Saran

1. BPJS Ketenagakerjaan Kota Padang harus memiliki sumber daya manusia yang cukup dan juga harus adanya batasan dan fokus yang jelas mengenai *Job Description* pegawai sehingga dapat maksimal dalam menerapkan program kepada seluruh masyarakat.
2. Meningkatkan kegiatan sosialisasi secara masif mengenai program kepada seluruh masyarakat, sehingga informasi program BPJS Ketenagakerjaan dapat merata dan adil didapatkan oleh masyarakat sehingga tidak ada lagi kesalahpahaman yang ada dimasyarakat mengenai program BPJS Ketenagakerjaan.

3. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah, lembaga, Agen Perisai dan wadah tenaga kerja untuk memperlancar penerapan program di masyarakat. Seperti bekerjasama dengan lembaga layanan publik yang mana dapat mengaitkan kewajiban menjadi peserta jaminan sosial dalam kegiatan administratif (peminjaman KUR, perizinan usaha, atau layanan dokumen penduduk)

